

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Ekonomi pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terjadinya pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan per kapita, tetapi sering kali diikuti dengan meningkatnya ketimpangan. Kuznets (1955) dalam tulisannya yang berjudul *Economics growth and income inequality* berhipotesis bahwa pembangunan ekonomi selalu disertai dengan peningkatan ketimpangan pada tahap awal, tetapi ketimpangan mulai menurun pada titik tertentu setelah negara mencapai tingkat pertumbuhan per kapita yang lebih tinggi. Sehingga ketimpangan yang tinggi dalam proses pembangunan dianggap suatu hal yang wajar.

Hipotesis Kuznets tersebut mulai diragukan kebenarannya, meskipun beberapa studi empiris menemukan pola kurva U terbaliknya. Menurut Gallup (2012), pembuktian secara empiris yang dilakukan selama ini masih belum begitu meyakinkan. Hampir semua kajian-kajian tersebut hanyalah pola *cross-sectional* antar negara, sementara itu hipotesis Kuznets adalah terkait ketimpangan di dalam negara. Literatur yang meneliti kebenaran hipotesis Kuznets dengan data deret waktu dalam satu negara jumlahnya masih sedikit. Tetapi literatur-literatur tersebut tidak menemukan kebenaran hipotesis Kuznets. Selain Gallup (2012), beberapa diantaranya yaitu Deininger & Squire (1998) yang menemukan bahwa lebih banyak negara yang memiliki jalur ketimpangan yang tidak sesuai dengan hipotesis Kuznets serta Maneejuk *et al.* (2019) yang tidak menemukan keberadaan kurva Kuznets pada perekonomian Thailand.

Selain bukti empiris yang belum meyakinkan, keraguan juga timbul karena kenyataan bahwa ketimpangan yang tinggi tidak hanya dihadapi oleh negara-negara berkembang tetapi juga di negara maju. Menurut N. Lee (2019), meskipun ketimpangan global menurun dalam 30 tahun terakhir, tetapi ketimpangan dalam negara cenderung meningkat. Keraguan atas hipotesis Kuznets tersebut merupakan salah satu pendorong muncul dan berkembangnya konsep tentang pertumbuhan inklusif.

Konsep pertumbuhan inklusif sedikit berbeda dengan konsep pertumbuhan ekonomi biasa. Pertumbuhan inklusif tidak hanya tentang peningkatan *output* atau pendapatan per kapita, tetapi tentang apakah peningkatan tersebut dapat mengurangi kemiskinan (Habito, 2009) dan ketimpangan (Rauniyar & Kanbur, 2009). Meskipun belum ada kesepakatan terkait definisi umum dari pertumbuhan inklusif, konsep ini tetap populer baik bagi para peneliti dan pengambil kebijakan di seluruh dunia.

Ada beberapa kelemahan terkait riset-riset empiris tentang pertumbuhan inklusif sebelumnya. Yang pertama adalah terkait kerangka teori ekonomi yang digunakan. Kajian-kajian tersebut belum memanfaatkan teori pertumbuhan yang berlandaskan distribusi pendapatan, misalnya teori pertumbuhan Kaldor (1957). Teori pertumbuhan ini mengasumsikan bahwa harus ada semacam “keseimbangan” antara keuntungan yang didapat oleh para pengusaha dengan upah yang diterima oleh para pekerja. Pengusaha harus menerima keuntungan maksimal agar dapat kembali diinvestasikan untuk meningkatkan output. Akan tetapi, keuntungan tersebut tidak boleh lebih dari suatu satuan rasio tertentu agar upah yang diterima oleh buruh dapat maksimal. Kondisi ini akan memacu produktivitas dari buruh tersebut sehingga output keseluruhan akan meningkat. Teori ini lebih rasional digunakan dalam kajian terkait pertumbuhan inklusif dibandingkan dengan teori-teori yang hanya mengandalkan *trickle down effect* dalam distribusi pendapatan.

Kedua, terkait proksi yang digunakan dalam mewakili pertumbuhan inklusif. Beberapa riset menggunakan PDB per kapita atau PDB per pekerja sebagai proksi pertumbuhan inklusif, misalnya Traoré (2018), Matthew *et al.* (2019), Oyinlola & Adedeji (2019) dan Oyinlola *et al.* (2021). Menurut McKinley (2010), PDB per kapita tidak cukup menjelaskan pertumbuhan kesejahteraan. Bahkan Oluseye & Gabriel (2017) menemukan ketimpangan meningkat saat terjadi peningkatan PDB per kapita.

Pertumbuhan inklusif menjadi salah satu agenda dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut dirancang beberapa strategi, diantaranya dengan mendorong inklusi keuangan dan digitalisasi. Tetapi bukti pengaruh digitalisasi dan inklusi keuangan

terhadap pertumbuhan inklusif masih belum sepenuhnya kuat. Karena relatif masih sedikit kajian spesifik terkait pengaruh inklusi keuangan dan digitalisasi terhadap pertumbuhan inklusif.

Salah satu literatur yang meneliti pengaruh digitalisasi terhadap pertumbuhan inklusif adalah Aslam *et al.* (2020). Mereka menyimpulkan bahwa inklusi digital hanya mempengaruhi pertumbuhan inklusif di negara berpenghasilan tinggi tetapi tidak di negara berpenghasilan menengah dan rendah. Hasil temuan ini memperpanjang perdebatan terkait pengaruh digitalisasi dan perkembangan teknologi informasi terhadap pertumbuhan di negara berkembang. Dedrick *et al.* (2013) serta Papaioannou & Dimelis (2007) menyatakan bahwa investasi di bidang teknologi dan informasi lebih berpengaruh di negara maju dibandingkan dengan negara berkembang. Sebaliknya, Thompson & Garbacz (2011) serta Appiah-Otoo & Song (2021) menyatakan bahwa negara berpenghasilan rendah memperoleh dampak lebih besar dibandingkan negara maju. Sementara itu Niebel (2018) menemukan dampak yang setara antara negara maju.

Studi yang spesifik meneliti pengaruh inklusi keuangan terhadap pertumbuhan inklusif muncul dari benua Afrika. Abor *et al.* (2018) melakukan penelitian di Ghana, sedangkan Afolabi (2020) di Nigeria. Abor *et al.* (2018) menyimpulkan bahwa inklusi keuangan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan inklusif. Jika rumah tangga memiliki akses ke berbagai layanan keuangan maka mereka dapat melakukan dan menerima pembayaran dengan mudah serta dapat berinvestasi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Afolabi (2020) menyatakan bahwa lebih banyak layanan keuangan di wilayah perdesaan akan membantu masyarakat disana berpartisipasi dalam perekonomian. Namun layanan keuangan harus dipantau dengan hati-hati untuk memastikan layanan tersebut dimanfaatkan untuk kegiatan produktif.

Literatur lainnya mengkaji pengaruh inklusi keuangan dan digitalisasi terhadap pertumbuhan, kemiskinan dan ketimpangan secara terpisah. Misalnya Myovella *et al.* (2019) melihat pengaruh digitalisasi terhadap pertumbuhan. Mereka menyimpulkan bahwa digitalisasi akan menyebabkan keterbukaan perdagangan sehingga mendorong pertumbuhan. Sedangkan Mora-Rivera & García-Mora

(2021) menemukan dampak positif akses internet terhadap pengurangan kemiskinan. Meskipun demikian, mereka menggaris bawahi bahwa hal tersebut bukanlah penentu utama. Tetapi hanya salah satu elemen yang dapat membantu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Menurut Mushtaq & Bruneau (2019), teknologi informasi dan komunikasi dapat mengurangi kemiskinan dan ketimpangan dengan mendorong terjadinya inklusi keuangan.

Inklusi keuangan akan meningkatkan akses yang lebih terhadap berbagai layanan keuangan khususnya bagi usaha-usaha yang terkendala permodalan sehingga mereka dapat terus berkembang dan akhirnya ikut berkontribusi terhadap pertumbuhan (D. W. Kim *et al.*, 2018; Van *et al.*, 2019; Nandi *et al.*, 2021), mengurangi kemiskinan dan ketimpangan (J. H. Kim, 2016; Omar & Inaba, 2020). Sementara itu, Demirguc-Kunt *et al.* (2017) menyatakan bahwa inklusi keuangan akan membantu masyarakat berinvestasi di masa depan sehingga dapat mengurangi kemiskinan dan ketimpangan.

Hal menarik datang dari studi yang dilakukan oleh Erlando *et al.* (2020) di Indonesia Bagian Timur. Mereka menemukan bahwa peningkatan rasio kredit terhadap PDB menyebabkan ketimpangan meningkat. Argumen mereka terkait temuan ini adalah kredit belum disalurkan secara merata. Usaha dengan skala besar masih memegang porsi lebih besar dalam menikmati kredit yang tersedia di lembaga keuangan. Tetapi argumen tersebut belum tentu sepenuhnya benar. Ada kemungkinan kredit yang dialokasikan belum dimanfaatkan untuk hal produktif seperti yang ditemukan oleh Banerjee *et al.* (2015) di India. Untuk itu diperlukan kajian lebih dalam untuk mengetahui alasan tepatnya. Kajian juga harus menggunakan proksi yang tepat, seperti penggunaan kredit oleh Usaha Mikro Kecil atau akses kredit oleh masyarakat miskin.

Beragam definisi menyiratkan pertumbuhan inklusif sebagai pertumbuhan yang pro terhadap kaum miskin maka seharusnya aspek penentu dari pertumbuhan inklusif sebaiknya juga menggunakan proksi di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. Selama ini masyarakat berpenghasilan rendah memiliki keterbatasan akses terhadap banyak hal, termasuk akses ke lembaga perbankan formal dan akses terhadap penggunaan internet. Jika inklusi keuangan dan

digitalisasi berdampak positif terhadap pertumbuhan inklusif di seluruh level pendapatan maka seharusnya dampaknya juga positif di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah.

Indonesia termasuk salah satu negara kepulauan terbesar di dunia dengan populasi penduduk pada tahun 2020 mencapai 270,2 juta jiwa (BPS, 2021a). Luasnya wilayah Indonesia menjadikannya sangat kaya akan keberagaman baik itu budaya, ras, suku bangsa, kepercayaan maupun bahasa. Dengan keberagaman, luasnya cakupan wilayah dan terpisahkan oleh pulau-pulau tentu menjadi tantangan yang cukup sulit bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan pembangunan. Setiap wilayah memiliki karakteristik sendiri baik dari segi berbagai aspek. Oleh sebab itu sejak tahun 2000 diberlakukan desentralisasi secara bertahap dan mulai diberlakukan penuh sejak tahun 2004 dengan dikeluarkannya UU nomor 23 tahun 2004. Dengan demikian pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan pembangunan di daerahnya masing-masing. Pada tahun 2019 terdapat 514 kabupaten/kota serta 34 provinsi di Indonesia. Dengan jumlah kabupaten/kota yang cukup banyak, karakteristik ekonomi masing-masing daerah dan kebijakan pemerintah daerah yang beragam maka akan sangat menarik jika dilakukan analisis dengan unit observasi kabupaten/kota. Berdasarkan uraian-uraian tersebut maka penelitian ini akan diberi judul **“Inklusi keuangan, digitalisasi dan pertumbuhan inklusif: bukti empiris menurut kabupaten/kota di Indonesia”**

B. Perumusan Masalah

Kepopuleran konsep pertumbuhan inklusif sepertinya menarik perhatian para pengambil kebijakan di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Istilah pertumbuhan inklusif muncul dalam RPJMN 2015-2019 sebagai salah satu arah kebijakan pemerintah Indonesia. Hal ini mungkin adalah bentuk antisipasi dari pemerintah Indonesia karena ketimpangan cenderung mengalami peningkatan sejak tahun 2000. Rata-rata perekonomian di Indonesia tumbuh 5,7 % dalam rentang 2005 hingga 2014, tetapi ketimpangan meningkat dari 0,33 menjadi 0,394 (World Bank, 2021). Ini menandakan bahwa pertumbuhan yang terjadi masih dinikmati oleh segelintir pihak, sementara sebahagian besar masyarakat hanya

mendapat porsi yang sangat sedikit dari pertumbuhan tersebut. Sehingga dibutuhkan program dan kegiatan yang dapat mendorong inklusifitas pertumbuhan di Indonesia.

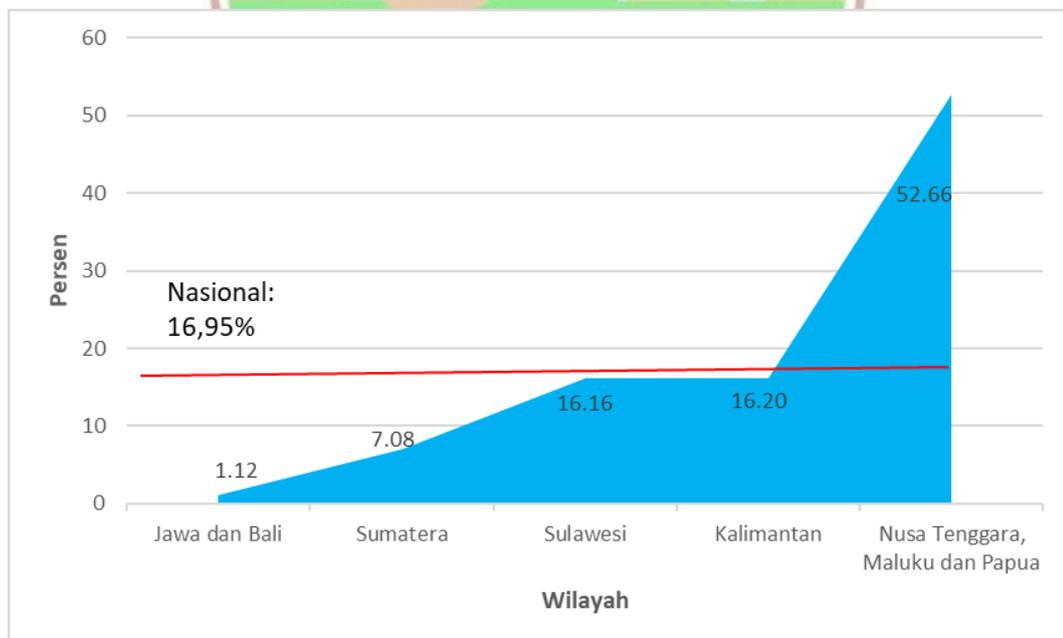
Visi dan misi Presiden terpilih periode 2019-2024 telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang di dalamnya memuat tujuh agenda pembangunan. Dari tujuh agenda tersebut terlihat bahwa pemerintah masih sangat peduli dengan pertumbuhan inklusif. Pada agenda pertama dijelaskan bahwa pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing. Meskipun istilah pertumbuhan inklusif telah muncul dalam dua RPJMN secara beruntun yaitu RPJMN 2015-2019 dan RPJMN 2020-2024 tetapi indikator pertumbuhan inklusif tersebut belum ada. Oleh sebab itu diperlukan sebuah ukuran yang jelas bagaimana dapat inklusifitas pertumbuhan itu dapat dicapai. Agar perencanaan yang dibuat oleh pemerintah dapat dievaluasi dengan lebih baik.

Inklusifitas pertumbuhan dapat terjadi jika seluruh lapisan masyarakat khususnya di lapisan bawah dapat menikmati pertumbuhan tersebut. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan mendorong usaha mikro kecil (UMK) untuk tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan usaha berskala besar. Permasalahannya, akses UMK terhadap permodalan tidak terlalu baik di Indonesia. Pada tahun 2017 terdapat 45,38 persen dari 26,07 juta UMK yang tidak pernah mengajukan kredit karena tidak punya agunan dan tidak tahu prosedur atau merasa prosedur sulit (BPS, 2019a). Oleh karena itu perlu diperluas akses kredit di lembaga keuangan formal terhadap usaha dengan skala kecil. Selain itu, digitalisasi UMK juga merupakan langkah lainnya yang harus diupayakan karena ekonomi berbasis digital yang semakin masif di seluruh dunia tak terkecuali di Indonesia.

Perkembangan ekonomi digital di Indonesia pada tahun 2020 sangat menggembirakan. Berdasarkan laporan *E-Conomy SEA* (2021), pengguna baru layanan ekonomi digital di Indonesia tumbuh 37 persen di tahun 2020. Sementara itu, nilai ekonomi digital di Indonesia pada tahun 2020 mencapai 44 milyar USD atau tumbuh lima kali lipat dibandingkan dengan tahun 2015. Ekonomi digital di Indonesia tahun 2020 didominasi oleh *e-commerce* dengan nilai 32 milyar USD

atau 72 persen dari total nilai ekonomi digital. Kondisi ini harus dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin agar ekonomi digital tidak hanya menjadi mesin pertumbuhan ekonomi tetapi juga sebagai alat untuk mengentaskan kemiskinan dan menurunkan ketimpangan. Menurut Chen & Zhang (2015), *e-commerce* dapat menghemat biaya, meningkatkan daya saing dan efisiensi bagi usaha mikro kecil dan menengah. Tetapi tentu saja ini harus didukung dengan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang sangat baik.

Tersedianya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang merata akan memberi garansi bahwa seluruh lapisan masyarakat akan mendapatkan informasi dan pengetahuan yang cepat dan setara. Infrastruktur teknologi informasi menjadi salah satu dari tiga fondasi untuk tercapainya inklusi keuangan menurut Perpres nomor 82 tahun 2016. Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang baik diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang lembaga keuangan formal baik itu manfaat dan risiko, biaya serta hak dan kewajiban. Dengan terbitnya perpres nomor 82 tahun 2016 tersebut menandakan bahwa pemerintah Indonesia mencoba untuk mendorong inklusi keuangan, dengan salah satu fondasinya yaitu infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.



Gambar 1. Persentase desa yang tidak memiliki sinyal seluler menurut pulau di Indonesia tahun 2018

Hasil Pendataan Potensi Desa tahun 2018 menunjukkan bahwa masih ada sebanyak 13,72 ribu desa di Indonesia yang sama sekali tidak mendapatkan sinyal internet atau sekitar 16,35 persen dari total desa. Sementara itu salah satu sasaran dalam RPJMN 2020-2024 yaitu ditargetkan 95 persen desa dapat dijangkau oleh sinyal *broadband*. Tentu perlu upaya keras pemerintah untuk mewujudkan target ini, mengingat kondisi geografis Indonesia yang cukup unik. Dari Gambar 1 terlihat bahwa timpangnya daerah yang dijangkau sinyal internet antara Jawa-Bali dan Luar Jawa-Bali. Dengan adanya ketimpangan ini maka akan menarik untuk dikaji apakah terdapat perbedaan yang cukup signifikan pengaruh inklusi keuangan dan digitalisasi di antara pulau-pulau tersebut. Sehingga kebijakan yang diambil dapat disesuaikan dengan kondisi di masing-masing pulau.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dibahas sebelumnya, maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan pertumbuhan inklusif menurut kabupaten dan kota di Indonesia pada tahun 2015-2019?
2. Apakah inklusi keuangan dan digitalisasi berpengaruh terhadap pertumbuhan inklusif di Indonesia?
3. Apakah inklusi keuangan dan digitalisasi berpengaruh terhadap pertumbuhan inklusif di masing-masing pulau di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum, penulisan ini menyajikan data dan analisis mengenai pertumbuhan inklusif pada tahun 2015-2019. Secara khusus, sejalan dengan permasalahan di atas, tujuan penulisan ini:

1. Menganalisis dinamika pertumbuhan inklusif menurut kabupaten dan kota di Indonesia pada tahun 2015-2019.
2. Menganalisis pengaruh inklusi keuangan dan digitalisasi terhadap pertumbuhan inklusif di Indonesia.
3. Menganalisis pengaruh inklusi keuangan dan digitalisasi terhadap pertumbuhan inklusif di masing-masing pulau di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Konsep pertumbuhan inklusif relatif masih sangat baru dan memiliki banyak ruang untuk dikembangkan. Penelitian ini mencoba memberi kontribusi terkait faktor-faktor yang mempengaruhi inklusifitas pertumbuhan dengan mencoba mengombinasikan beberapa aspek yang belum pernah dilihat pengaruhnya secara bersamaan. Selain itu dalam penelitian ini mencoba menggunakan inklusifitas pertumbuhan sebagai variabel terikat. Pada banyak literatur tentang pertumbuhan inklusif mereka cenderung menggunakan pertumbuhan pendapatan per kapita sebagai proksi dari pertumbuhan inklusif. Selain itu penelitian yang ada sebelumnya masih melihat pengaruh inklusi keuangan secara umum, sementara itu dalam penelitian ini akan dilihat bagaimana pengaruh inklusi keuangan di kalangan berpenghasilan rendah terhadap pertumbuhan inklusif.

Dari sisi teori, penelitian ini mencoba menggunakan teori pertumbuhan Kaldor untuk menjelaskan pertumbuhan inklusif. Kaldor memasukkan asumsi distribusi pendapatan antara pekerja dan pengusaha dalam membangun teori pertumbuhannya. Belum ditemukan literatur yang mengkaji pertumbuhan inklusif menggunakan teori. Sementara itu dari sisi kebijakan diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam perumusan kebijakan terkait perencanaan pembangunan ekonomi yang nantinya berimplikasi terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, sehingga dapat tercapai kesejahteraan yang setara bagi seluruh masyarakat.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini menganalisis pengaruh inklusi keuangan dan digitalisasi terhadap pertumbuhan inklusif. Inklusi keuangan dan digitalisasi yang dimaksud hanya terbatas pada dimensi akses khususnya akses bagi masyarakat kurang beruntung. Sementara itu pertumbuhan inklusif yang dimaksud dalam penelitian ini mencoba mengakomodasi dari berbagai definisi yang kemudian dikerucutkan menjadi pertumbuhan yang positif, mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Objek dalam penelitian ini adalah kabupaten/kota di Indonesia dengan waktu analisis yaitu tahun 2015 hingga 2019.

F. Sistematika Penulisan

Bab I (Pendahuluan) terdiri dari subbab latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan. Subbab latar belakang menjelaskan tentang urgensi yang mendasari penulis mengkaji penelitian ini. Subbab rumusan masalah, sejumlah fakta dan fenomena inklusi keuangan, kondisi infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi serta arah kebijakan pemerintah di Indonesia diuraikan untuk menunjukkan permasalahan yang akan diteliti dan disusun dalam bentuk pertanyaan penelitian. Selanjutnya pada subbab tujuan penelitian dicantumkan beberapa tujuan untuk membahas tiap pertanyaan penelitian. Selanjutnya pada subbab manfaat penelitian, dibahas manfaat-manfaat penelitian secara teoritis, metodologis dan praktis (kebijakan). Selanjutnya subbab ruang lingkup penelitian menjelaskan batasan-batasan penelitian yang mencakup batas ukuran dan karakteristik umum sampel analisis, batasan-batasan pendekatan teoritis, penjelasan redaksional dan batasan pemilihan variabel.

Bab II (Tinjauan Literatur) terdiri dari subbab konsep dan teori, penelitian terdahulu, kerangka analisis dan hipotesis penelitian. Dalam subbab konsep dan teori, dikemukakan teori pertumbuhan Kaldor yang digunakan dalam penelitian ini. Kemudian dalam subbab penelitian terdahulu, dikemukakan risalah penelitian-penelitian terdahulu yang dapat menjadi pedoman dalam menjelaskan fenomena, justifikasi hasil dan acuan teknis dalam membahas penelitian ini. Selanjutnya subbab kerangka analisis memuat skema untuk menjelaskan kerangka penelitian secara matematis dan dalam bentuk diagram. Selanjutnya subbab hipotesis penelitian menjelaskan tentang sejumlah hipotesis yang disusun berdasarkan pertanyaan penelitian dan akan diuji pada bagian analisis penelitian.

Bab III (Metodologi Penelitian) memuat subbab rancangan penelitian; pengumpulan data; pengolahan, analisis dan interpretasi data, tempat dan waktu penelitian, definisi operasional variabel penelitian dan deklarasi model penelitian. Subbab rancangan penelitian menjelaskan langkah-langkah teknis pelaksanaan penelitian. Subbab pengumpulan data menjelaskan tentang teknik pengambilan sampel, jumlah dan distribusi sampel data. Subbab pengolahan, analisis dan interpretasi data menjelaskan tentang perangkat lunak yang dipakai dalam

pengolahan data, menjabarkan tentang teknik analisis deskriptif dan analisis regresi yang digunakan. Subbab tempat dan waktu penelitian menjelaskan tentang wilayah dan rentang waktu penelitian dilaksanakan. Subbab definisi operasional variabel menjelaskan tentang makna teknis dari variabel-variabel yang dilibatkan dalam analisis.

Bab IV (Gambaran Umum) memuat tentang kondisi wilayah penelitian seperti kondisi geografi, pemerintahan, demografi, sosial dan ekonomi. Dalam bab ini ditampilkan berupa data tentang kondisi tersebut yang disajikan dalam bentuk tabel dan grafik disertai uraian ringkas.

Bab V (Hasil dan pembahasan) memuat tentang hasil dari penelitian yang dianalisis berdasarkan teori-teori dan hasil kajian empiris sebelumnya. Dalam bab ini juga akan dijabarkan implikasi kebijakan berdasarkan temuan empiris dari penelitian ini. Rekomendasi kebijakan ditujukan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Bab VI (Kesimpulan dan saran) memuat rangkuman hasil dari penelitian ini. Sementara itu bagian saran dijabarkan kekurangan-kekurangan dalam penelitian ini dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

